



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

BNN KOTA KEDIRI

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA KEDIRI

Jl. Selomangleng No.03, Kota Kediri
Call Center: (0354) 777333, 7766226
Email: bnnkota_kediri@bnn.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Kota Kediri Tahun 2023 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Rencana Kinerja Tahunan Kota Kediri ini merupakan penjabaran Rencana Program Kerja (Renproja) dalam target tahunan dan media penghubung antara Renproja dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, target kinerja, anggaran, dan indikator kinerja yang menggambarkan indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi di wilayah satuan kerja BNN Kota Kediri.

Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan kinerja dan anggaran program kegiatan sehingga dapat mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun anggaran 2023.

Demikian semoga Allah SWT memudahkan dan meridhoi usaha kita dalam kebaikan, Aamiin.

Kediri, 27 Desember 2022

Kepala BNN Kota Kediri



Bunawar, S.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Kota Kediri karena dapat mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian target kinerja, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagaimana hasil Musren BNN Tahun 2022, bahwasanya pelaksanaan Program Desa Bersinar, Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN), serta Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) masih belum dilaksanakan secara terintegrasi karena distribusi target dari masing-masing deputi tidak sama, hal tersebut berpengaruh terhadap anggaran yang diterima satker dan juga pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- b. Jumlah tenaga ASN yang terbatas, masih belum sesuai dengan kebutuhan pegawai sesuai DSP BNN Kabupaten/ Kota, apalagi di tengah polemik rencana penghapusan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) beralih pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) yang sedikit banyak mempengaruhi fokus kerja pegawai yang ada.
- c. Minimnya sarana dan prasarana Klinik Pratama sebagai penyedia layanan rehabilitasi dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN).
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan, salah satunya kendaraan (R4) untuk transportasi lapangan dan juga perlengkapan sosialisasi/ diseminasi informasi tatap muka di lapangan.

2. Hasil Evaluasi

Adapun hasil evaluasi terhadap permasalahan yang ada serta hasil capaian kinerja pada tahun 2022, adalah sebagai berikut:

- a. Meski pada tahun anggaran 2021 dan 2022 jumlah target Program Desa Bersinar, KOTAN, serta IBM tidak sama, tapi setidaknya di Kota Kediri, program tersebut telah dilaksanakan pada lokasi yang sama, yaitu salah satu Kelurahan Bersinar (ada beberapa kelurahan bersinar yang tidak mendapat program IBM). Perbedaan jumlah target pada tahun-tahun sebelumnya sudah tidak terjadi lagi pada tahun anggaran 2023. Jumlah target untuk Desa Bersinar, KOTAN, dan IBM untuk tahun 2023 sama-sama 2 (dua) tinggal menyesuaikan target lokasi pelaksanaannya di lapangan.
- b. Melakukan pemetaan tenaga ASN, Polri, dan juga Tenaga Kerja Kontrak yang ada untuk optimalisasi pelaksanaan kinerja Satker. Meskipun demikian, masih perlu diajukan usulan/ permohonan penambahan jumlah personel untuk mencapai kinerja yang lebih maksimal.
- c. Kendaraan operasional Roda 4 yang sudah ada perlu ditingkatkan lagi pemeliharaan dan perawatannya sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja.
- d. Dari 9 target Perjanjian Kinerja, ada 1 yang tidak tercapai yaitu "Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi", hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya sarana dan prasarana Klinik Pratama BNN Kota Kediri yang belum memiliki ruang konseling. Hal tersebut akan menjadi prioritas dan akan diupayakan dengan mempergunakan ruangan (di luar klinik) yang sudah ada, untuk dialihfungsikan menjadi ruang konseling. Terkait kebutuhan sarana dan prasarana lain akan dilakukan pendataan lebih lanjut.

- e. Nilai IKPA Tahun 2022 sudah memenuhi target, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal, yaitu:
- 1) Deviasi Halaman III DIPA (pada beberapa bulan terdapat selisih yang cukup besar antara realisasi anggaran dan RPD)
 - 2) Capaian Output (terdapat 2 output yang masih belum mencapai target yaitu "Layanan IBM" dan "Layanan SKHPN")
- Untuk mengatasi hal tersebut dan mengoptimalkan Nilai IKPA, maka hendaknya dilakukan koordinasi yang lebih intens antara pelaksana di lapangan, bagian keuangan, dan perencanaan sehingga kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan dapat berjalan selaras dengan RPD yang telah disusun. Jika dalam pelaksanaan dan upaya pencapaian target terdapat masalah hendaknya disampaikan untuk dapat didiskusikan dan mencari solusi terbaik bersama-sama.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BNN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BNN KOTA KEDIRI

TAHUN 2023

Badan Narkotika Nasional Kota Kediri menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023. Rencana kinerja BNN Kota Kediri sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Satuan Kerja Kota Kediri. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kota Kediri Tahun 2023 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53.00 Indeks	Rp.82.000.000,-
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.69 Indeks	Rp.100.000.000,-
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.25 Indeks	Rp.211.695.000,-
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang	Rp.9.835.000,-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	Rp.7.110.000,-
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	Rp.49.965.000,-
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	3.20 Indeks	Rp.0,-
7.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	Rp.45.000.000,-
8.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	87 Indeks	Rp.32.768.000,-
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	95 Indeks	Rp.114.008.000,-

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNNK
(Sebutkan nilai keterpulihan per kawasan rawan yang diintervensi)*

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Kota Kediri Tahun 2023 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kota Kediri tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kota Kediri selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Kota Kediri
Tahun 2023

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	10 Orang
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2 Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Indeks Kemandirian Partisipasi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan	5 Orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	Lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
			Layanan rehabilitasi di Klinik BNN Kota Kediri	20 Orang
			Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	660 Orang

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2 Lembaga
7.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit vertikal)	1 Perkara
8.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
			Layanan Perkantoran	12 Layanan